

ABSTRAKSI

Otorisasi tanah harus didasarkan pada bukti yang sah bahwa sertifikat tanah, tapi kali serin yang terjadi hanya kontrol terbatas atas tanah pada kontrol fisik tanah hanya karena secara hukum tidak ada bukti dalam bentuk sertifikat. Tanah Indonesia dalam administrasi lahan yang luas ini memerlukan hati-hati dan rapi. Hak atas tanah milik semua warga negara dan badan hukum yang ada di Indonesia wajib disiplin untuk menghindari masalah administrasi yang disebabkan oleh perampasan tanah hak atas tanah atau kepemilikan tanah oleh pihak yang tidak memiliki hak atas tanah.

Aset tanah PT. Kereta Api Indonesia (Persero) adalah tanah yang memiliki karakteristik khusus, karena merupakan kombinasi dari tanah dari zaman kolonial untuk pembebasan lahan ini, selain itu ada juga grondkaart atau peta tanah dari zaman penjajahan Belanda. Grondkaart atau peta tanah ini di Indonesia hanya dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero), dan tidak ada departemen atau lembaga pemerintah yang telah grondkaart. Dalam perkembangan penegakan di grondkaart dimiliki oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero) akan dikenakan penolakan atau hambatan karena segala macam hal, antara lain, tanah yang terkandung dalam grondkaart telah muncul hak atas tanah yang diberikan oleh negara kepada orang lain. Badan Pertanahan Nasional juga memiliki peran penting dalam pengakuan hak atas tanah baik milik perorangan atau badan hukum di Indonesia. Namun administrasi pertanahan tertib di Indonesia, dapat mengangkat isu-isu lahan baru, karena hak atas tanah isu sangat sensitif dan kepentingan umum.

Kata kunci: Aset Tanah PT. Kereta Api Indonesia, Administrasi

Pertanahan, Masyarakat Sipil, Penegakan Hukum, Hak atas Tanah.

ABSTRACTION

Land authorization should be based on valid evidence that the land certificate, but serine time that happened was only limited control over land on physical control of land just because legally there is no evidence in the form of certificates. Indonesian land in this vast land administration requires careful and neat. Rights on land owned by all citizens and legal entities that exist in Indonesia was obliged to be disciplined in order to avoid administrative problems caused by the land grabbing of land rights or land ownership by parties who have no right to the land.

Land assets of PT. Kereta Api Indonesia (Persero) is a land that has special characteristics, because it is a combination of land from colonial era to the present land acquisition, besides that there are also grondkaart or soil maps of the Dutch colonial era. Grondkaart or map these lands in Indonesia only owned by PT. Kereta Api Indonesia (Persero), and there are no departments or government agencies that have grondkaart. In the development of enforcement on grondkaart owned by PT. Kereta Api Indonesia (Persero) will be subject to rejection or obstacles because all sorts of things, among others, the soil contained in the grondkaart have emerged land rights granted by the State to others. National Land Agency also have an important role in the recognition of land rights either belong to individuals or legal entities in Indonesia. Yet orderly land administration in Indonesia, can raise issues new land, because the land rights issue is very sensitive and the public interest.

Keywords :Land Assets of PT. KeretaApi Indonesia, Land Administration, Civil Society, Law Enforcement, Rights on Land.